

**Kebijakan Pemerintah Dalam Pelaksanaan Pengadaan Fasilitas Sekolah
Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Esang Mamahan**

Oleh:

Septein Alase Masanggelo¹

Novie Pioh²

Neni Kumayas³

Abstrak

Hal ini pun seperti yang ditemui juga di Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara dan pulau yang paling utara yang sehingga menimbulkan berbagai masalah, bahkan mengenai masalah pendidikan yang ada di sana, sehingga pendidikan yang ada di kabupaten kepulauan talaud masi sangat memprihatinkan bagi para masyarakat khususnya di daerah Kabupaten Kepulauan Talaud mulai dari kurangnya gedung sekolah, guru, bahkan fasilitas yang masi sangat kurang yang ada di sekolah. SMP Negeri 3 Essang melakukan beberapa cara dari semua cara pengadaan sarana prasarana pendidikan dan disesuaikan dengan kebutuhan serta dana yang disediakan. Fasilitas pendidikan di SMP Negeri 3 Essang dapat dikelompokkan dalam empat kelompok yaitu tanah, bangunan, perlengkapan, dan perabot sekolah (*site, building, equipment, and furniture*). Meskipun begitu, dalam kenyataannya dari pengamatan di lapangan masih terdapat banyak kekurangan. Dalam hal fasilitas terdapat tidak ada akses Internet. Dengan Luas Tanah : 10,000 M², terdapat Ruang Kelas: 8, Laboratorium : 1, Perpustakaan : 1, Sanitasi Siswa : 3 Rasio Siswa Ruang Kelas 5.38, Persentase Ruang Kelas Layak 100. Berarti ruang kelas dapat dibilang sudah layak.

Kata Kunci : **Kebijakan Pemerintah, Pengadaan, Fasilitas Sekolah**

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

²Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan suatu proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan; proses, cara, perbuatan mendidik. Sehingga dengan pendidikan kita bisa mengetahui dan mendapatkan banyak pengetahuan yang bisa menambah keterampilan, juga dapat menambah bakat yang ada di dalam diri setiap orang.

Pendidikan di Indonesia secara konstitusional telah di amanakan dan di rumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea ke empat dengan pokok kalimat utama “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Kalimat ini bermakna bahwa pendidikan merupakan salah satu tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Konsep nasional dalam undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan tegas dinyatakan bahwa “pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat (1) disebutkan bahwa : setiap warga berhak mendapatkan pendidikan.

Pendidikan di Indonesia merupakan seluruh pendidikan yang diselenggarakan di Indonesia, baik itu

secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Secara terstruktur, pendidikan di Indonesia menjadi tanggung jawab kementerian pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud), dahulu bernama departemen pendidikan nasional Republik Indonesia (Depdiknas). Di Indonesia, semua penduduk wajib belajar pendidikan dasar selama Sembilan tahun, enam tahun di sekolah dasar dan tiga tahun di sekolah menengah pertama. Saat ini pendidikan di Indonesia di atur melalui Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan di Indonesia terbagi ke dalam tiga jalur utama, yaitu formal, nonformal, dan informal. Pendidikan juga dibagi ke dalam empat jenjang yaitu anak usia dini, dasar, menengah, dan tinggi.

Pendidikan sebagai aspek penting dan ujung tombak dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya manusia agar supaya mampu bersaing di tengah kompetisi kehidupan berbangsa yang semakin maju dan moder. Seperti yang kita ketahui Pendidikan adalah investasi jangka panjang dan menjadi kunci untuk masa depan yang lebih baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa adanya pendidikan yang memadai dan berkualitas, maka bangsa Indonesia akan semakin tertinggal dan tidak bisa bersaing dengan Negara-negara lain. salah satu aspek penting untuk memajukan pendidikan adalah adanya guru-guru yang profesional.

Dalam sistem pendidikan sekolah, guru, fasilitas merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem pendidikan dan banyak mengambil peran di dalam proses pendidikan secara luas khususnya dalam pendidikan persekolahan. Guru

atau pendidik merupakan orang yang sangat berpengaruh bagi terselenggaranya mutu pendidikan yang berkualitas.

Hal ini pun seperti yang ditemui juga di Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara dan pulau yang paling utara yang sehingga menimbulkan berbagai masalah, bahkan mengenai masalah pendidikan yang ada di sana, sehingga pendidikan yang ada di kabupaten kepulauan talaud masi sangat memprihatinkan bagi para masyarakat khususnya di daerah Kabupaten Kepulauan Talaud mulai dari kurangnya gedung sekolah, guru, bahkan fasilitas yang masi sangat kurang yang ada di sekolah.

Dalam program pemerintah pusat sekolah mempunyai Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dana ini bisa digunakan untuk administrasi kegiatan sekolah, penyediaan alat-alat pembelajaran, pembayaran honor, pengembangan perpustakaan, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, dan sebagainya. Dana BOS juga terdiri dari tiga jenis dana BOS yang disalurkan oleh pemerintah, antara lain, BOS Regular, BOS Kinerja dan BOS Afirmasi. Ketiga jenis dana BOS ini dimanfaatkan untuk hal yang berbeda-beda.

Salah satu tujuan dana ini untuk membenahi masalah-maslah yang ada di sekolah tetapi hasil opserfasi saya selain kekurangan guru khususnya di SMP Negeri 3 Esang terdapat juga fasilitas sekolah yang memprihatinkan baik berupa bangku yang suda tidak layak, bangku yang suda tidak sesuai dengan jumlah siswa, kurangnya buku-buku pelajaran, perpustakaan yang masi kosong, dan sebagainya. Menarik untuk saya teliti bagaimana PERAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN

OLAHRAGA DALAM PENGADAAN FASILITAS SEKOLAH DI SMP NEGERI 3 ESANG DI MAMAHAN

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimana peran dinas pendidikan pemuda dan olahraga dalam pengadaan fasilitas sekolah di SMP".

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peran dinas pendidikan pemuda dan olahraga dalam pengadaan fasilitas sekolah di SMP Negeri 3 Esang di Mamahan

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, berangkat dari rumusan masalah dan disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai, maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2016:9) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana data yang tidak relevan. Pembatasan dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kajian yang lebih teliti. Menurut Moleong (2007:94) melalui fokus penelitian, peneliti akan tahu persis data mana

dan data tentang apa yang perlu dikumpulkan dan data mana pula yang walaupun mungkin menarik, karena tidak relevan tidak perlu dimasukkan ke dalam sejumlah data yang sedang dikumpulkan. Jadi, dengan penetapan fokus yang jelas dan mantap, seorang peneliti dapat membuat keputusan yang tepat tentang data mana yang dikumpulkan dan mana yang tidak perlu dijamah ataupun mana yang akan dibuang.

Adapun folus penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan dinas pemuda dan olahraga dalam pengadaan fasilitas di SMP Negeri 3 Essang yang difokuskan Pembahasan soal kebijakan pengadaan fasilitas sekolah di SMP Negeri III Essang Kabupaten Talaud akan dilihat dengan konsep yang disampaikan Grindle (2016:142) bahwa suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian *outcomes* (yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih). Yang mana hal ini dapat dilihat dari dua hal berikut :

1. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (*design*) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
2. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu:
 - a. Impak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok.
 - b. Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Dinas pendidikan pemuda dan olahraga Kabupaten Kepulauan Talaud.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran umum penduduk Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2014 yang berjumlah 82.916 jiwa penduduk usia sekolah sebanyak 20.209 jiwa atau 24.38% dari jumlah penduduk yang terdiri dari usia sekolah TK 2.085, SD. 10.01. Dengan 20.209 jiwa penduduk usia sekolah atau 24.38% dari jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Talaud, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga menghadapi permasalahan yang antara lain 1)kurangnya guru yang bersedia ditempatkan di daerah pedalaman termasuk pulau terluar/kecil; 2) lemahnya kualitas tenaga pengajar baik dalam mengajar, mem-buat bahan ajar dan penyusunan materi; 3) sarana fisik baik berupa gedung, alat peraga bidang studi, peralatan laboratorium, buku-buku pelajaran dan peralatan pelajar mengajar yang tidak memadai. Data menunjukkan dimana dari 364 ruang kelas SD terdapat 84 ruangan kelas rusak ringan dan 68 ruangan kelas rusak berat; 4)tidak adanya data kependidikan untuk menunjang program on-line jardiknas. (Londa, 2016).

Suatu permasalahan yang sangat menarik serta memiliki keunikan dalam dunia pendidikan di Kabupaten Kepulauan Talaud dimana dalam posisi sebagai daerah perbatasan yang sangat kurang sarana dan prasarana penunjang pendidikan serta ditambah dengan tidak tersediannya dana yang cukup dari daerah dalam pembiayaan pendidikan yang dibuktikan dengan adanya dana untuk Dinas Pendidikan

Pemuda dan Olahraga yang hanya kurang lebih 11% dari APBD dimana tidak sesuai dengan amanat undang-undang yang seharusnya mengharuskan daerah untuk mengalokasikan dana pendidikan 20% dari APBD. Kondisi ini ternyata tidak menurunkan semangat insan pendidikan di Kabupaten Kepulauan Talaud untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang terbukti dari adanya peningkatan kualitas lulusan pada semua tingkatan pendidikan yang termasuk didalamnya Sekolah Dasar (SD).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban Bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan Bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Perumusan Visi menunjuk pada Visi Pendidikan secara Nasional dipadukan dengan Visi Kabupaten yakni: "Terwujudnya Sistem Pendidikan sebagai Pranata sosial yang kuat, berwibawa menjadikan Kabupaten Kepulauan Talaud yang utuh, maju, berbudaya dan damai sejahtera." Misi:

1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh masyarakat.
2. Membantu memfasilitasi pengembangan potensi anak secara utuh sejak usia dini

sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar.

3. Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral.
4. Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas satuan pendidikan di Kabupaten Kepulauan Talaud.
5. Memberdayakan peran serta masyarakat/Stake Holders dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonom dalam konteks Negara Kesejahteraan Republik Indonesia.

Gambaran Umum Fasilitas Sekolah di SMP Negeri 3 Essang

Fasilitas sekolah umumnya mencakup semua fasilitas yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, seperti: Gedung, ruangan belajar atau kelas, alat-alat atau media pendidikan, meja, kursi, dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan fasilitas/prasarana adalah yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan, seperti: halaman, kebun atau taman sekolah, maupun jalan menuju ke sekolah.

Fasilitas pendidikan di SMP Negeri 3 Essang dapat dikelompokkan dalam empat kelompok yaitu tanah, bangunan, perlengkapan, dan perabot sekolah (*site, building, equipment, and furniture*). Beberapa hal yang perlu dikembangkan dalam menunjang proses belajar mengajar: 1) perpustakaan, 2) sarana penunjang kegiatan kurikulum, dan 3) prasarana dan sarana kegiatan ekstrakurikuler dan mulok.

Banyak gedung sekolah yang berada di perdesaan masih belum di perbaiki oleh pihak pemerintah. Tetapi, gedung sekolah yang berada di kota besar terus mengalami perbaikan gedung. Lapangan yang dimiliki oleh sekolah kumuh hanyalah berupa tanah liat yang akan menghasilkan banyak genangan air apabila hujan. Tetapi, lapangan sekolah yang berada dikota sudah dilapis semen yang rata dan dibentuk seperti lapangan pada umumnya. Sangatlah memperhatikan jika kita melihat banyak siswa yang harus belajar diluar ruangan, dibawah teriknya sinar mentari dan tidak memiliki peralatan atau sarana yang kurang bahkan tidak lengkap. Sedangkan ruang kelas yang berada di kota besar memiliki sarana maupun fasilitas yang canggih dan terbilang lengkap.

Seperti yang kita ketahui bahwa perpustakaan yang ada disetiap sekolah berbeda-beda. Ada sekolah yang memiliki perpustakaan tetapi memiliki pasokan buku yang sangat terbatas, ada pula sekolah yang tidak memiliki perpustakaan seperti di kota kecil. Tetapi, jika kita membandingkan perpustakaan yang ada di kota besar, cukup banyak sekolah yang memiliki perpustakaan bahkan dengan pasokan buku yang lengkap.

Sekolah-sekolah yang ada dikepulauan Talaud terutama yang ada di pedesaan seperti SMP Negeri 3 Essang mempunyai perbedaan dengan sekolah-sekolah di perkotaan, dalam hal saran dan prasaranya. Banyak sekali perbedaan yang dapat kita lihat dari segala sisi, untuk segala kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan yang dibutuhkan oleh pelajar disekolah demi kelancaran belajar mengajar. Perbandingan

sarana dan prasaran yang ada di kota besar maupun di kota kecil sangatlah bertentangan, karena banyak yang harus diperbaiki dan dilengkapi.

Sekolah SMP Negeri 3 Essang pada tahun 2018 sudah mencatatkan dirinya dalam penilaian nasional dengan predikat akreditasi A. Kepala Sekolahnya bernama Meliyana Lalonda. Terdapat guru sebanyak 7 orang, dengan siswa Laki-laki 19 orang, Siswa Perempuan 24, Rombongan Belajar ada 3 rombongan.

Meskipun begitu, dalam kenyataannya dari pengamatan di lapangan masih terdapat banyak kekurangan. Dalam hal fasilitas terdapat tidak ada akses Internet, Sumber Listrik dari PLN dengan Daya Listrik : 900. Luas Tanah : 10,000 M², Ruang Kelas: 8, Laboratorium : 1, Perpustakaan : 1, Sanitasi Siswa : 3 Rasio Siswa Ruang Kelas 5.38, Persentase Ruang Kelas Layak 100. Berarti ruang kelas dapat dibilang sudah layak.

Nilai Akreditasi turut memperlihatkan nilai sarana dan prasarana sekolah, dengan nilai 88, berarti tergolong baik. Berikut nilai akreditasi keseluruhan di bawah ini (BAN, 2019) Standar Isi : 94, Standar Proses : 88, Standar Kelulusan : 88, Standar Tenaga Pendidik : 92, Standar Sarana Prasarana : 88, Standar Pengelolaan : 97, Standar Pembiayaan : 98, Standar Penilaian : 95, Tahun : 2018, Nilai Akhir : 92. Akreditasi : A

Program Pembangunan fasilitas sekolah sebagai bentuk bantuan terdiri dari Rehab, Revitalisasi, RKB, Sanitasi, USB, BOS, PIP, TIK

Nama sekolah : SMP NEGERI 3 ESSANG dengan nomor NPSN : 40103553, NSS :

201170405094. Alamat : Jalan ESSANG-GEMEH Desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara . Kategori Sekolah adalah Sekolah Potensial atau SPM, dengan tahun beroperasi 2002. Kepemilikan tanah/ bangunan adalah Milik Pemerintah dengan Luas tanah/status : 10.000 M2/ sertifikat, Luas bangunan : 602 M2

Kebijakan Pengadaan Fasilitas Sekolah

Pembahasan soal kebijakan pengadaan fasilitas sekolah di SMP Negeri III Essang Kabupaten Talaud akan dilihat dengan konsep yang disampaikan Grindle (2016:142) bahwa suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian *outcomes* (yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih). Yang mana hal ini dapat dilihat dari dua hal berikut :Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (*design*) dengan merujuk pada aksi kebijakannya. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu: Impak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok dan Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

Standard Pengadaan Barang di SMP Negeri 3 Essang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana Pendidikan adalah Pada pasal 42 Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar

lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruangan perpustakaan, ruangan laboratorium, ruang bengkel kerja, ruangan unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolah raga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang /tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, perlu dipahami prinsip-prinsip apa saja yang harus dipegang dalam melaksanakan manajemen sarana dan prasarana. Menurut Hunt Pierce dalam Endang H. dan Sukarti N, prinsip dasar dalam manajemen sarana prasarana sekolah sebagai berikut:

- 1) Lahan bangunan dan perlengkapan perabot sekolah harus menggambarkan cita dan citra masyarakat seperti halnya yang dinyatakan dalam filsafat dan tujuan pendidikan.
- 2) Perencanaan lahan bangunan, dan perlengkapan–perlengkapan perabot sekolah hendaknya merupakan pancaran keinginan bersama dan dengan pertimbangan suatu tim ahli yang cukup cakap yang ada dimasyarakat.
- 3) Lahan bangunan dan perlengkapan–perlengkapan perabot sekolah hendaknya disesuaikan dan memadai bagi kepentingan anak – anak didik, demi terbentuknya karakter mereka dan dapat melayani serta

menjamin mereka di waktu belajar, bekerja, dan bermain sesuai dengan bakat mereka masing – masing.

- 4) Bahan bangunan dan perlengkapan–perlengkapan perabot sekolah serta alat–alatnya hendaknya disesuaikan dengan kepentingan pendidikan yang bersumber dari kepentingan serta kegunaan atau manfaat bagi anak–anak murid–murid dan guru–guru.
- 5) Sebagai penanggung jawab sekolah harus membantu program sekolah secara efektif, melatih para petugas serta memilih alatnya dan cara menggunakannya agar mereka dapat menyesuaikan diri serta melaksanakan tugasnya sesuai dengan fungsi dan profesinya.
- 6) Seorang penanggung jawab sekolah harus mempunyai kecakapan dan mengenal, baik kualitatif maupun kuantitatif serta menggunakan dengan tepat fungsi bangunan dan perlengkapannya
- 7) Sebagai penanggung jawab harus mampu memelihara dan menggunakan bangunan dan tanah sekitarnya sehingga ia dapat membantu terwujudnya kesehatan, keamanan, kebahagiaan dan keindahan serta kemajuan dari sekolah dan masyarakat.
- 8) Sebagai penanggung jawab sekolah bukan hanya mengetahui kekayaan sekolah yang dipercayakan kepadanya, melainkan harus memerhatikan seluruh keperluan alat–alat pendidikan yang dibutuhkan oleh anak didiknya.

Kemudian ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk kegiatan pengadaan sarana prasarana

pendidikan, diantaranya sebagai berikut: Pembelian, Produksi sendiri, Penerimaan hibah, Penyewaan, Peminjaman, Pendaurlangan,

Dalam pengadaan sarana prasarana harus mengacu pada Permendiknas Nomor 24 tahun 2007 tentang standar Sarana Prasarana. Pada umumnya, pengadaan sarana prasarana pendidikan melewati prosedur sebagai berikut: Menganalisis kebutuhan sarana prasarana serta fungsinya , Mengklarifikasi sarana prasarana yang dibutuhkan, Menyusun proposal pengadaan sarana prasarana. Proposal dari ekolah kalau negeri ditujukan kepada pemerintah melalui dinas terkait dan proposal dari sekolah swasta ditujukan kepada pemerintah, Menerima peninjauan dari pihak yang dituju untuk menilai kelayakan sekolah memperoleh sarana prasarana apa tidak, Setelah ditinjau dan dikunjungi, sekolah akan menerima kiriman sarana prasarana yang diajukan..

Berdasarkan jenisnya, pengadaan sarana prasarana Pendidikan dapat dilakukan sebagai berikut: Tanah, Bangunan, Perabot. Agar pembelian perabot dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan dapat dipertanggungjawabkan maka perlu adanya suatu pedoman sebagai berikut: Rencana kebutuhan telah disetujui berdasarkan penelitian dan hitungan yang mendalam. Peraturan tentang pembelian, baik pembelian langsung maupun melalui tim pembelian. Perabot yang akan dibeli dapat berbentuk sudah jadi atau belum jadi. Perabot yang belum jadi perlu dibuat dahulu sesuai dengan kehendak pemohon. Tentang pembelian perabot yang sudah jadi, kepala sekolah/proyek perlu membuat

rencana kebutuhan, sesuai dengan syarat- syarat yang diperlukan. Untuk pengadaan perabot yang belum jadi, kepala sekolah/proyek perlu; [1] Menyusun kebutuhan; [2] Penunjukan konsultan perencanaan perabot; [3] Menyusun syarat syarat teknis sesuai denganspesifikasi dan menyediakan gambar-gambar perabot yang akan dibeli; [4] Membuat kontrak; [5] Membuat berita acara serah terima perabot. Pembelian perabot dapat dilakukan dengan lelang, penunjukan langsung, dan penawaran.

Proses Pengadaan

Sarana pendidikan adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Sedangkan prasarana pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan sekolah menurut Drs.Daryanto dan Drs. Mohammad Farid, MT (2013:106). Contoh dari sarana pendidikan adalah spidol, kertas, kursi, meja, komputer dan lain-lain. Sedangkan contoh dari prasarana pendidikan seperti ruang teori, ruang perpustakaan, ruang labor, WC, kantin sekolah, ruang UKS, lapangan sekolah dan lain sebagainya.

Proses pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan di lembaga pendidikan seperti sekolah sama semua tahapannya. Begitu juga di SMPN 3 Essang pengelolaan sarana dan prasarana pendidikannya dimulai dari proses perencanaan sarana dan prasarana pendidikan, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan, penyimpanan, penyaluran ,pemeliharaan, dan rehabilitas.

Proses Perencanaan Fasilitas Sekolah

Bahwa dalam proses perencanaan sarana dan prasarana di

SMP Negeri 3 Esaang sudah dilakukan dengan baik oleh pihak pimpinan hal ini dapat diketahui melalui beberapa proses yang dijalankan, seperti pembentukan panitia untuk merancang kebutuhan yang mendetail terhadap sarana dan prasarana yang diperlukan dan selanjutnya setelah mendata atau merancang kebutuhan adalah penyusunan anggaran pembelanjaan sarana dan prasarana. Hal ini dilakukan dengan sangat hati- hati agar hal-hal yang telah direncanakan dapat sesuai dengan kebutuhan sekolah. Akan tetapi masih banyak kekurangan dalam menjalankan proses perencanaan sarana dan prasarana, sehingga belum terpenuhinya proses standarisasi yang di tentukan oleh pemerintah. Sehingga ada beberapa yang belum terlaksana dalam pelaksanaan perencanaan yang sudah di sepakati oleh pihak sekolah.

Prosesnya adalah ; Penyusunan rencana pengadaan, Seleksi dan penentuan skala prioritas. Proses pengadaan sarana dan prasarana di SMP Negeri 3 Esaang berjalan dengan cukup baik, akan tetapi masih terdapat hambatan yang bersifat pendanaan. Setelah dibicarakan bersama maka untuk pengadaan sarana prasarana pendidikan SMP Negeri 3 Essang, yang dibutuhkan dan diusulkan adalah sebagai berikut: Alat-alat pendidikan, Alat-alat kantor, Alat-alat perabot. Dana bantuan wali murid dana BOS dan bantuan pemerintah juga digunakan untuk pembelian atau pengadaan perabot kantor seperti: meja kursi, rak, almari, papan tulis dan lainnya.

Pembentukan panitia pengadaan dilakukan sebagai pelaksana dari program yang telah diagendakan dalam keputusan rapat perencanaan.

Panitia pengadaan tidak harus selalu dibentuk, keadaan ini dilakukan sesuai ketentuan dengan syarat sarana atau prasarana yang akan diadakan dilihat dari besarnya nilai sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan dari pusat.

Pengadaan merupakan segala kegiatan untuk menyediakan semua keperluan sarana dan prasarana pendidikan. Dilakukan dengan cara membeli, menyewa, dan menerima hibah dari pihak lain. Di SMPN 3 Essang mengenai pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dilakukan oleh pihak sekolah. Dalam pengadaan sarana prasarana pendidikan dalam meningkatkan mutu SDM di SMP Negeri 3 Essang, kepala sekolah maupun pihak sekolahbekerja sama dengan pemerintah terkait, komite sekolah, dan wali murid guna pemenuhan sarana prasarananya agar memenuhi standarisasi yang ditetapkan oleh pemerintah.

Proses pengadaan yang dilakukan SMP N 3 Essang sebagian besar dengan melakukan pembelian dari berbagai macam sumber dana pemerintah, misalkan dana BOSDA, walaupun ada cara dengan hibah tapi itu hanya sebagian kecil dari sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah .

Kesimpulan

Kebijakan ialah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu dengan mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Sarana dan prasarana pendidikan yang ada mulai dari Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan masih kurang

sarana prasarana perlu diperhatikan dengan baik oleh pemerintah daerah. Pemerintah Daerah sebagai pembuat dan penyelenggara kebijakan masih kurang dalam pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Talaud mulai dari jenjang Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan.

Standar sarana dan prasarana merupakan tolak ukur untuk menunjang keberhasilan proses belajar dan mengajar disekolah, sarana dan prasarana yang tidak sesuai dengan standar yang ada akan berakibat pada kenyamanan siswa dan para guru dalam proses belajar dan mengajar, karena standar sarana dan prasarana merupakan salah satu dari tujuh standar sekolah yang harus dipenuhi untuk menunjang pembelajaran disekolah.

Berdasarkan temuan lapangan melalui wawancara dan pengamatan, upaya yang dilakukan kepala sekolah dalam rangka pemenuhan sarana prasarana sekolah diantaranya selalu mengupayakan kelengkapan sekolah yang dibutuhkan sekolah. Menjaga kualitas sarana prasarana yang sudah ada, melakukan pemeliharaan secara rutin sarana prasarana yang sudah ada.

Standar sarana prasarana pendidikan nasional yang di tetapkan pemerintah membuat sekolah berlomba-lomba memenuhi bahkan melebihi standar yang ditetapkan oleh pemerintah, untuk menjadikan sekolahnya lebih baik dalam pelayanan pembelajaran terhadap siswa. Akan tetapi pada pelaksanaanya masih banyak sekolah di Indonesia yang belum memenuhi kriteria standar sarana prasarana yang ditetapkan oleh pemerintah.

Usaha pemenuhan standar sarana dan prasarana disekolah SMP

Negeri 3 dilihat kepada informasi dari guru, staff dan juga siswa. Untuk standar secara keseluruhan belum sepenuhnya memenuhi, meskipun dapat dikategorikan layak untuk digunakan sebagai sarana belajar mengajar. Melihat penilaian akreditasi terlihat baik.

Dalam menentukan skala prioritas sarana prasarana pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada dilapangan dan anggaran yang tersedia. Dalam menentukan skala prioritas juga SMP Negeri 3 Essang juga melakukan perbandingan antara sarana prasarana yang diajukan dengan standar sarana prasarana pendidikan yang sudah ditetapkan dalam peraturan menteri pendidikan nasional No. 27 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Prasarana Pendidikan.

Pengadaan sarana prasarana pendidikan merupakan tahap kedua setelah dilakukannya perencanaan. Pengadaan sarana prasarana pendidikan yaitu merealisasikan hasil dari perencanaan sarana prasarana pendidikan. Pelaksanaan pengadaan sarana prasarana pendidikan yang dilakukan SMP Negeri 3 Essang bertujuan untuk menyediakan semua jenis sarana prasarana pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dalam jangka 1 (satu) tahun yang disesuaikan dengan kebutuhan dilapangan, standar yang ditetapkan dan anggaran yang tersedia.

Pengadaan sarana prasarana terdiri dari beberapa cara yaitu antara lain (1) Pembelian, (2) Produksi sendiri, (3) Penerimaan hibah/bantuan, (4) Penyewaan, (5) Peminjaman, (6) Pendaurlangan, (7) Penukaran, (8) Rekondisi/Pemeliharaan, dan (9) Lelang (Barnawai & M. Arifin, 2012:60- 63). Dari kesembilan cara

tersebut SMP Negeri 3 Essang melakukan pengadaan sarana prasarana dengan memakai beberapa cara yaitu antara lain pembelian, penerimaan hibah, penyewaan, peminjaman dan pemeliharaan.

SMP Negeri 3 Essang melakukan beberapa cara dari semua cara pengadaan sarana prasarana pendidikan dan disesuaikan dengan kebutuhan serta dana yang disediakan. SMP Negeri 3 Essang melakukan pengadaan sarana prasarana terlebih dahulu membuat proposal pengadaan sarana prasarana untuk kelengkapan administrasi. Dengan adanya proposal pengadaan sarana prasarana pendidikan maka apa yang sudah direncanakan dapat dituangkan dalam bentuk daftar kebutuhan yang disebut dengan proposal pengadaan sarana prasarana pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Noeng Muhadjir, *Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*. Yogyakarta : Raka Sarasin, th.2000
- Heinz Weihrich and Harold Koontz, *Management A.Global Perspective Tent Edition* (New York : McGraw-Hill, Inc., 1993),
- Amin Priatna, Disertasi "*Analisis Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Dosen pada Universitas Pendidikan Indonesial*", Paca Sarjana UNJ, tahun 2008
- Haroid KoontzCyrill O'Donell, and Heinz Weihrich, *Management Eighth Edition* (New York : McGraw-Hill Book Company, 1992)
- William C. Frederick, Keith Davis and James E. Post, *Business and Society, Coeporate Strategy*,

- Public Policy, Ethics, Sixth Edition* (New York : McGraw-Hill Publishing Company, 1998)
- Noeng H, Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kebijakan dan Evaluasi Reseach* (Yogyakarta : Rake Sarakin, 2003)
- Bambang Margono dkk, *Pembaharuan Perlindungan Hukum*, Jakarta: Inti Ilmu, Th.2003
- Gerston, L,N, *Public Policy Making in A Democratic society : A Guide to CIVIC Engaagement* (New York : M.E Sharp, inc, 1992)
- William N. Dunn, *Public Policy Analysis : An Introduction* (New Jersey : Prentice Hal, inc.,, 1994), p7 Terjemahan ISIPOL (Yogyakarta: Gajak Mada University Press: 2003)
- R. Thomas Dye, Horn Meter, *Under Standing Public Police*, Pentice Hall, Inc, Englewood Cliffs, USA, Th, 1987
- Arif Rohman, *Politik Ideologi Pendidikan*, Yogyakarta: Mediatama, tahun 2009
- Riant Nugroho, *Public Policy*, Jakarta: Alex Media Komputindo, tahun 2008
- Muzayyin Arifin, 2003. *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), h. 12
- Edy Sutrisno, 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta : Kencana, 2011), hlm. 65.
- Harsono, 2011. *Etnografi Pendidikan sebagai Desain Penelitian Kualitatif*, (Surakarta : Univeritas Muhammadiyah Surakarta, 2011)
- Tafsir, A. (2008). *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Tilaar, H.A.R. & Riant Nugroho. (2012). *Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Willis, Sofyan S. (2013). *Psikologi Pendidikan*, Bandung: Alfabeta.
- Dewantara, Ki Hadjar. (2009). *Menuju Manusia Merdeka*. Yogyakarta. Leutika.
- Hamengkubuwono X. (2010). *Pendidikan Karakter Bangsa dalam Konsep Kebudayaan Ki Hadjar Dewantara*. Makalah disajikan pada seminar nasional di Kadipaten Pakualaman Yogyakarta tanggal 29 Mei 2010.
- Kristian, Dikson, dkk, 2014. *Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, Jurnal Kertha Negara
- Muhibbiin Syah. 2010. *Psikologi Belajar*. Jakarta : Rajawali Pers